

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 11 JANUARI – 7 MARET 2021
(Masa Sidang Mulai Tanggal 11 Januari – 10 Februari 2021
dan Masa Reses Mulai Tanggal 11 Februari – 7 Maret 2021)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Panja Pembahasan RUU tentang PDP Komisi I DPR RI telah melaksanakan pembahasan materi RUU PDP dengan Tim Panja Pemerintah pada tanggal:

1. 12-14 Januari 2021
2. 19-20 Januari 2021

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, Komisi I DPR RI melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka membahas:

1. evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2020;
2. realisasi Anggaran T.A. 2020;
3. persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021
yaitu:
 1. Raker dengan Menlu pada tanggal 26 Januari 2021
 2. RDP dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas pada tanggal 27 Januari 2021
 3. Raker dengan Menkominfo tanggal 1 Februari 2021
 4. RDP dengan KPI, KIP, dan Dewan Pers pada tanggal 1 Februari 2021
 5. RDP dengan Kepala Bakamla pada tanggal 2 Februari 2021
 6. RDP dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI tanggal 3 Februari 2021
 7. Raker dengan Kepala BSSN pada tanggal 3 Februari 2021
 8. Raker dengan Kepala BIN pada tanggal 8 Februari 2021

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan kegiatan:

1. Raker/RDP/RDPU dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu:

- a. RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkominfo beserta Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI pada tanggal 18 Januari 2021 dalam rangka:
 - 1) Penjelasan Sekjen Kemkominfo terkait kronologis pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021 – 2026;
 - 2) Penjelasan Panitia Seleksi terkait seleksi Calon Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021 – 2026

dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Sekjen Kemkominfo RI tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 yang dibentuk atas dasar Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 424 Tahun 2020 yang memiliki reputasi, kapasitas, dan kompetensi di bidangnya masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Perwakilan
1.	Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli S.H., M.H., FCBARB	Ketua merangkap Anggota	Pemerintah
2.	J. H. Philip M. Gobang, M.Si.	Sekretaris merangkap Anggota	Pemerintah
3.	Zulfan Lindan, S.I.Pol.	Anggota	Pemerintah
4.	Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.A.	Anggota	Pemerintah
5.	Ir. Kristiono	Anggota	Masyarakat
6.	Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah S.Sn.	Anggota	Masyarakat
7.	Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.	Anggota	Universitas
8.	Prof. Dr.Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si.	Anggota	Universitas
9.	Prof. Dr. Arif Satria, S.P., MSi.	Anggota	Universitas

- 2) Komisi I DPR RI telah mendengarkan Penjelasan Panitia Seleksi Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 dan seluruh rangkaian proses tahapan seleksi Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 sebagai berikut:
 - a) Persyaratan Pendaftaran Seleksi
 - b) Timeline Pelaksanaan Seleksi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi	Pengumuman Seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI	30 September 2020
		Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI	1-12 Oktober 2020
2	Penilaian Administrasi	Pengumuman Hasil Seleksi Administratif	6 November 2020
3	Penilaian Makalah	a. Penulisan Makalah Calon Anggota KPI Pusat	16 November 2020
		b. Penilaian Makalah	26-28 November 2020
		c. Pengumuman Hasil Penilaian Makalah	2 Desember 2020
4	Asesmen Psikologis	Pelaksanaan Tes Asesmen Psikologis	10-12 Desember 2020
5	Rekam Jejak dan Masukan Publik	Penyampaian permohonan informasi rekam jejak ke Ditjen Aptika Kemkominfo (media sosial), PPATK, BIN, KPK, dan BNPT	14 Desember 2020
		Masukan publik melalui email	2-19 Desember 2020
6	MMPI	Pelaksanaan MMPI	26 Januari 2021
7	Wawancara	Pelaksanaan wawancara oleh Pansel Dewas LPP RRI	10 Februari 2021
8	Penyampaian 15 nama calon anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026	Penyampaian daftar 15 nama calon anggota Dewas LPP RRI oleh Menteri Kominfo kepada Presiden	28 Februari 2021

- c) Sampai dengan penutupan pendaftaran seleksi Calon Anggota Dewas LPP RRI Tahun 2021-2026 pada tanggal 12 Oktober 2020 terdapat total 672 Pendaftar. Selanjutnya hasil seleksi peserta dalam setiap tahapan sebagai berikut:
- i. Lulus seleksi administrasi sebanyak 184 peserta.
 - ii. Lulus penilaian makalah sebanyak 45 peserta.
 - iii. Seleksi Asesmen Psikologis hanya dihadiri 44 dari 45 orang peserta.
 - iv. Pelaksanaan Tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021.
 - v. Permohonan rekam jejak kepada PPATK, KPK, BIN, dan BNPT dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020, serta masukan masyarakat melalui email dari tanggal 2–19 Desember 2020.
- 3) Komisi I DPR RI meminta kepada Pansel Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 dalam rangkaian proses tahapan seleksi dilakukan secara ketat, cermat, independen, adil, serta membuka ruang partisipasi publik, untuk menghasilkan Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 yang berkualitas, berintegritas, tidak terpapar oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta profesional sehingga nantinya dapat menjadikan LPP RRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang kuat, mandiri, dan profesional.
- 4) Selanjutnya Komisi I DPR RI juga meminta Pansel menyertakan *track record* atau rekam jejak dari 15 nama Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 yang diserahkan oleh Menteri Kominfo RI kepada Presiden RI sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. RDPU Komisi I DPR RI dengan ORARI pada tanggal 25 Januari 2021 dalam rangka mendengarkan penjelasan ORARI terkait dengan kegiatan ORARI, dengan catatan rapat sebagai berikut:
- 1) Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas peran ORARI dalam memberikan dukungan komunikasi, baik dalam kondisi bencana dan non bencana di Indonesia.

Kedepannya, Komisi I DPR mendorong agar ORARI makin berperan lebih optimal dalam dukungan komunikasi, termasuk informasi terkait pandemi Covid-19.

- 2) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh ORARI terkait beberapa permasalahan ORARI yakni:
 - a) Dukungan/bantuan Pemerintah terhadap ORARI yang belum memadai;
 - b) Belum maksimalnya kerja sama antara ORARI dengan TNI, khususnya dalam kegiatan IOTA DXP edition di wilayah 3T;
 - c) Masukan ORARI bahwa Rancangan Peraturan Menkominfo pengganti Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, yang belum sepenuhnya sejalan dengan aspirasi ORARI. Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan mendorong Kemkominfo untuk melibatkan ORARI dan RAPI dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menkominfo pengganti Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
 - 3) Sehubungan dengan poin 2 (dua), Komisi I DPR RI akan meneruskannya dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra terkait.
- c. Raker dengan Menlu pada tanggal 26 Januari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual, antara lain mengenai:
- 1) Perkembangan Diplomasi Vaksin Covid-19 guna Program Vaksinasi Nasional;
 - 2) Kebijakan perlindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19;
 - 3) Kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan kawasan: perkembangan di AS, Palestina, Afganistan, dan stabilitas di Kawasan Indo Pasifik.
- dengan Rapat bersifat tertutup.
- d. RDP dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas pada tanggal 27 Januari 2021 dalam rangka isu-isu aktual terkait dengan Lemhannas dan Wantannas, dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas untuk terus melakukan kajian strategis yang diperuntukkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dalam rangka menuju pencapaian sasaran pembangunan nasional.
 2. Komisi I DPR RI mendorong Wantannas untuk terus meningkatkan tugas, peran, dan fungsi seiring perkembangan jaman yang semakin terbuka dengan adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan media sosial yang akan dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan.
- e. Raker dengan Menkominfo tanggal 1 Februari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual bidang Kominfo, antara lain:
- 1) Laporan Perkembangan Transformasi Digital dan penyusunan Digital Roadmap serta realisasinya;
 - 2) Peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi Covid-19 gelombang kedua
- dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk melaksanakan program-program strategis di TA 2021, sebagai berikut:
- 1) Penyelesaian pembuatan peta jalan digital sebagai acuan dalam pengembangan penggunaan TIK berbasis digital di era 4.0, penanganan pandemi Covid-19 serta

pelaksanaan *Analog Switch Off (ASO)* di Tahun 2022 sejalan dengan pengesahan UU tentang Cipta Kerja.

- 2) Pembangunan Infrastruktur TIK khususnya di wilayah 3T termasuk di lokasi satuan tugas pengamanan perbatasan NKRI.
 - 3) Penyelenggaraan komunikasi publik yang lebih optimal terkait program vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, sehingga meminimalkan penyebaran berita hoaks terkait program tersebut.
 - 4) Sinergitas yang lebih solid antara Pemerintah dan Komisi I DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan pada tahun 2021.
 - 5) Pembangunan Pusat Data Nasional sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kedaulatan dan keamanan data serta memastikan tidak adanya intervensi dari negara asing.
 - 6) Pelibatan Orari dalam mendiskusikan rancangan pengganti Permenkominfo No.17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
 - 7) Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk segera melaksanakan Penyiapan *Showcase 5G* di Indonesia.
- f. RDP dengan KPI, KIP, dan Dewan Pers pada tanggal 1 Februari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual:
- 1) KPI Pusat
 - a) Laporan perkembangan penyusunan revisi P3SPS;
 - b) Pengawasan KPI terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Penyiaran;
 - c) Langkah strategis KPI terkait persiapan digitalisasi pasca UU Cipta Kerja.
 - 2) KIP
 - a) Laporan perkembangan penyusunan Standar Layanan Informasi Publik termasuk Materi Legal Standing Wartawan dan Advokat sebagai Pemohon Informasi Publik dan Pemohon Sengketa Informasi Publik;
 - b) Laporan perkembangan penyelesaian sengketa Informasi KI Pusat sekaligus topik sengketa informasi yang paling sering terjadi hingga akhir tahun 2020;
 - c) Langkah Strategis KIP terhadap Keterbukaan Informasi Publik sebagai Modal Pemerintahan Digital Indonesia
 - 3) Dewan Pers
 - a) Laporan perkembangan terkait upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas perusahaan pers;
 - b) Laporan perkembangan terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh Jurnalis di Masa Pandemi Covid-19;
 - c) Tanggapan Dewan Pers soal Keputusan KI Pusat terkait Legal Standing Wartawan sebagai Pemohon Informasi Publik dan Pemohon Sengketa Informasi Publik
- dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk, melakukan hal-hal berikut:
 - a) KPI Pusat
 - i. Menuntaskan revisi P3SPS, paling lambat pertengahan tahun 2021;
 - ii. Memaksimalkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 pada lembaga penyiaran; dan,
 - iii. Melakukan langkah strategis secara berkesinambungan agar *Analog Swicth Off (ASO)* pasca UU tentang Cipta Kerja dapat berjalan dengan baik.

- b) KI Pusat
 - i. Menerapkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi pada masyarakat;
 - ii. Meningkatkan penyelesaian sengketa informasi publik secara lebih optimal; dan,
 - iii. Melakukan langkah strategis terkait keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan digital Indonesia.
 - c) Dewan Pers
 - i. Melakukan upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas Perusahaan Pers secara lebih optimal; dan,
 - ii. Melakukan langkah strategis terkait penguatan Pers Nasional untuk tetap bertahan menghadapi krisis di masa Pandemi Covid-19.
- 2) Komisi I DPR RI mendukung langkah KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing secara optimal, optimis dan berkelanjutan pada TA 2021.
- g. RDP dengan Kepala Bakamla pada tanggal 2 Februari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual antara lain penjelasan mengenai:
- 1) Penguatan sistem keamanan laut terkini dan antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi dan ilmu pengetahuan;
 - 2) Dinamika ancaman dan tantangan keamanan laut, penegakan hukum dan kedaulatan di laut, dan keamanan perbatasan di laut dengan negara-negara perbatasan dengan Indonesia;
 - 3) Peningkatan kerja sama di bidang keamanan laut dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik;
 - 4) Dukungan regulasi, sistem persenjataan serta sarana dan prasarana dalam rangka memperkuat pelaksanaan Tupoksi Bakamla.
- dengan kesimpulan:
- Komisi I DPR RI dan Bakamla mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya percepatan RUU tentang Keamanan Laut yang substansinya antara lain memberikan peran dan kewenangan yang lebih kepada Bakamla dari posisi saat ini.
- h. RDP dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI tanggal 3 Februari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual :
- 1) Upaya strategis LPP TVRI dan LPP RRI terkait migrasi penyiaran analog ke digital dalam rangka persiapan menuju digitalisasi penyiaran (analog switch off) Tahun 2022 sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2) Peran LPP TVRI dan LPP RRI dalam diseminasi informasi dan keberlanjutan Pembelajaran jarak jauh.
- dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Berkaitan dengan penjelasan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran TA 2020, persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN TA 2021 serta isu- isu aktual, Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Komisi I DPR RI sebagai berikut:
 - a) meningkatkan optimalisasi koordinasi kerja dan kolaborasi Dewas dan Direksi dalam rangka penguatan pengawasan, konsolidasi kerja, dan peningkatan kinerja LPP TVRI dan LPP RRI.

- b) Meningkatkan peran LPP TVRI dan LPP RRI dalam upaya diseminasi informasi, dukungan terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh melalui berbagai program belajar, program vaksinasi Covid-19, penegakan protokol kesehatan Covid-19, pencerdasan publik terkait informasi kebencanaan, bahaya radikalisme, dan program penguatan rasa nasionalisme yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.
 - c) kesungguhan LPP TVRI dan LPP RRI dalam menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menuju digitalisasi penyiaran atau migrasi penyiaran analog (*analog switch off*) Tahun 2022 sesuai amanat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain: infrastruktur digital (pemancar digital), peningkatan kualifikasi dan SDM Profesional, dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dalam rangka Penyiaran Digital baik penggunaan *Set Top Box* dan radio penerima digital.
 - d) mendorong percepatan penyelesaian RPP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta memperhatikan dengan cermat, teliti, hati-hati, dan memberikan keterlibatan publik atas substansi materi muatannya apakah sudah sinkron serta mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait.
 - e) mempercepat pembahasan revisi PP No.12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan PP No. 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tentang penerapan regulasi terkait tugas dan fungsi organisasi, kepegawaian, serta pelaksanaan anggaran.
 - f) meminta LPP TVRI dan LPP RRI memberikan laporan tertulis terkait Barang Milik Negara/Aset Negara kepada Komisi I DPR RI selama 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian pengawasan legislatif selambat-lambatnya dua pekan setelah RDP pada hari ini.
- 2) Komisi I DPR RI meminta jawaban tertulis dari LPP TVRI dan LPP RRI atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini selambat-lambatnya hari Selasa, 9 Februari 2021.
- i. Raker dengan Kepala BSSN pada tanggal 3 Februari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual, antara lain:
- 1) Strategi nasional keamanan siber saat ini dan mendatang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih;
 - 2) Perkembangan, tantangan, dan peluang pengelolaan keamanan siber di era revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0;
 - 3) Peran dan antisipasi BSSN dalam mengamankan serangan dan ancaman Siber untuk melindungi data dan informasi milik private, publik, dan negara dalam rangka ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
- dengan kesimpulan:
- 1) Komisi I DPR RI dan BSSN mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber yang salah satu substansi penting yang perlu diatur adalah pengaturan strategi nasional keamanan siber.
 - 2) Komisi I DPR RI mengingatkan BSSN atas salah satu kesimpulan Raker tanggal 25 Juni 2020 yang pada intinya Komisi I DPR RI mendorong BSSN agar terus meningkatkan upaya pengamanan dan meminimalisir risiko ancaman informasi di ruang siber dengan memanfaatkan hasil karya sendiri dan atau berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga negara dalam mewujudkan aplikasi yang relatif aman dari berbagai jenis ancaman, serangan, peluang dan tantangan perkembangan ruang siber

- j. Raker dengan Kepala BIN pada tanggal 8 Februari 2021 dalam rangka membahas isu-isu aktual:
- 1) Pemetaan dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19;
 - 2) Temuan *Seaglider* di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan;
 - 3) Isu separatis Papua; dan
 - 4) Stabilitas keamanan dalam negeri.
- dengan Rapat bersifat tertutup.

2. Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 4 Februari 2021 dalam rangka:

- a. Penetapan Pergantian Pimpinan Komisi I DPR RI
- b. Penggantian Anggota Dewas LPP TVRI 2017-2022;
- c. Rencana Kunjungan Lapangan ke Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta;
- d. Lain-lain

dengan kesimpulan:

Memutuskan menyetujui pergantian unsur Pimpinan Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, yang semula Teuku Riefky Harsya (A-522) digantikan oleh H. Anton Sukartono Suratno, M.Si. (A-542), maka unsur Pimpinan Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:

1. Yth. Meutya Viada Hafid

Nomor A-267 / F-PG sebagai Ketua Komisi I DPR RI

2. Yth. Utut Adianto

Nomor A-194 / F-PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI

3. Yth. H. Bambang Kristiono, S.E.

Nomor A-122 / F-Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI

4. Yth. H. Anton Sukartono Suratno, M.Si.

Nomor A-542 / F-Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI

5. Yth. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

Nomor A-442 / F-PKS sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI



3. Kunjungan Lapangan

Komisi I DPR RI pada tanggal 4 Februari 2021 telah melakukan Kunjungan Lapangan ke Wisma Atlet Kemayoran dalam rangka mengunjungi tenaga kesehatan dari unsur TNI yang bertugas di sana.

4. Kunjungan Kerja

a. Kunker Spesifik Komisi I DPR RI

Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I

DPR RI, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi :

- 1) Banten (Tangerang) tanggal 28-30 Januari 2021 dalam rangka mengetahui:
 - a) Deteksi dini dan peringatan dini gangguan distribusi vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi;
 - b) Deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman program kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19; dan
 - c) Deteksi dini dan peringatan dini penyebaran paham ideologi radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan metode perekrutan yang luas berkembang seiring perkembangan zaman melalui media sosial dan teknologi.
- 2) Jawa Barat (Bandung) tanggal 28-30 Januari 2021 untuk mengetahui kesiapan Kodam III/Siliwangi dalam mendukung penanganan Covid-19, pengamanan distribusi Vaksin dan pengamanan Vaksinasi di Provinsi Jawa Barat.



b. Kunker Reses

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, yaitu pada tanggal 15-18 Februari 2021, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke Provinsi:

- 1) Lampung
- 2) Jawa Tengah (Semarang)
- 3) Jawa Tengah (Solo)

5. Pertemuan/Courtesy Call dengan Delegasi Negara Sahabat

- a. Pada tanggal 18 Januari 2021, Ketua Komisi I DPR RI beserta beberapa Anggota Komisi I DPR RI melaksanakan pertemuan secara virtual/Webinar dengan Palemen Iran.
- b. Pada tanggal 5 Februari 2021, Ketua Komisi I DPR RI beserta beberapa Anggota Komisi I DPR RI menerima/melaksanakan:
 - 1) Courtesy Call Duta Besar Korea Selatan Hon. Mr. Park Tae Sung
 - 2) Pertemuan secara virtual/Webinar dengan Duta Besar Uni Eropa, HE. Vincent Piket.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Jakarta, 22 Februari 2021
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001